



TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			v																											

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

B7



HUMAS UNTUK RADAR TARAKAN  
PIMPIN RAPAT: Pj Gubernur Kaltara, Triyono Budi Sasongko memberikan arahan kepada sejumlah kepala SKPD terkait akan dilakukannya audit oleh BPK RI Perwakilan Kaltara.

# BPK Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan

## Kepala SKPD Diminta Siapkan Data

**TANJUNG SELOR** - Pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan daerah memasuki tahap awal. Selasa (2/2), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara resmi melakukan pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

Penjabat Gubernur Kaltara, Triyono Budi Sasongko mengatakan basis laporan tahun anggaran (TA) 2015 menggunakan basis akrual sehingga audit pun dilakukan secara akrual.

"Instrumen ataupun dokumen yang dibutuhkan juga semakin kompleks, namun semoga kita bisa terus belajar untuk menyempurnakan setiap kekurangan yang ada," jelas Triyono saat memberi sambutan di depan seluruh

kepala SKPD.

Untuk diketahui, terdapat empat instrument sistem audit dalam penetapan opini, yang pertama penguatan sistem internal. Kedua kepatuhan atas aturan undang-undang, sedangkan yang ketiga ialah kecukupan dalam kelengkapan laporan serta mampu menjalani sistem audit pemerintahan yang berlaku.

Audit kali ini lebih sebagai supervisi menjadi pembinaan terhadap laporan keuangan yang baru belajar mengadaptasi basis akrual. Terlebih jika Triyono menyatakan untuk dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun tantangan setiap tahunnya akan semakin besar, terlebih dengan sistem baru berbasis akrual.

"Saya mengimbau seluruh SKPD untuk menyiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan BPK terkait dokumen dan laporan yang dibutuhkan, jika memungkinkan saya berharap minimalisir

dahulu dinas luar bagi pejabat ataupun pegawai yang berkaitan langsung dalam pemenuhan laporan kepada BPK," tegas Triyono.

Sementara, Kepala Divisi Hukum BPK RI Perwakilan Kaltara Pawana Darma Wanahta memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara. Dia mengharapkan agar kerjasama dari pemprov Kaltara khususnya pejabat pengelola keuangan.

"Selama beberapa minggu ke depan kami harapkan kerja samanya agar segala yang terkait pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik lagi," ujar Pawana Darma yang menjabat sebagai ketua tim pemeriksa.

"Sikap aktif dan kooperatif seperti tahun lalu sudah ditunjukkan oleh Pemprov Kaltara hendaknya dipertahankan dan semoga dapat meraih opini terbaik di tahun anggaran 2015, waktu dan tenaga kami butuhkan bagi rekan-rekan SKPD sekalian," jelas Pawana. (hmsprov)